

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cancel culture merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh sebuah komunitas atau masyarakat untuk membatalkan dan meredupkan dukungan terhadap seorang individu, kelompok ataupun sebuah brand yang sudah melanggar aturan atau norma yang berlaku di kalangan masyarakat (Altamira & Movementi, 2023). Di kalangan Masyarakat saat ini *Cancel culture* berperan sangat besar dalam pengendalian sosial kontrol dan pengubahan budaya agar memberikan efek jera terhadap pelanggar norma (Yanuar et al., 2023). Fenomena *Cancel culture* juga menjadi salah satu fenomena sosial yang semakin berkembang di era digital, di mana individu atau kelompok berusaha untuk berhenti mendukung seseorang yang dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran norma. Di Indonesia fenomena ini sering terlihat di media sosial, di mana kritik dan penilaian terhadap karakter masyarakat dapat menyebar dengan cepat. Akan tetapi *Cancel culture* ini masih sering dipertanyakan ketegasannya, apalagi dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki sistem lebih ketat.

Di dalam ruang publik, *Cancel culture* menjadi sarana yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketidakseimbangan kekuasaan agar tetap bertahan. Ketika ada suatu individu atau kelompok yang dianggap dapat mengancam tatanan atau norma yang bisa menguntungkan pihak yang berkuasa atau mempunyai power mulai membuka suara, *Cancel culture* bisa digunakan

untuk membungkam mereka. Pihak yang berkuasa justru akan memobilisasi masyarakat dan media, untuk membentuk narasi yang negatif mengenai kelompok atau individu tersebut. Dengan demikian, *Cancel culture* ini bukanlah reaksi spontan dari publik melainkan respon yang terstruktur dan dikoordinasikan oleh pihak yang memiliki kepentingan agar opini publik bisa diarahkan untuk mengisolasi atau meminggirkan pihak-pihak yang dianggap mengancam posisi kekuasaan mereka (Purnamasari, 2022).

Kekuasaan memegang peranan penting dalam mendorong *Cancel culture*. Karena *Cancel culture* dapat menjadi alat untuk menantang kekuasaan yang korup atau tidak adil, seperti dalam kasus pejabat publik yang terlibat korupsi. *Cancel culture* juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan, terutama ketika digunakan untuk menekan lawan politik atau kelompok minoritas. Di Indonesia, *Cancel culture* sering dipolitisasi dan digunakan untuk memajukan kepentingan tertentu, sementara di Korea Selatan, *Cancel culture* cenderung lebih terorganisasi dan diarahkan untuk menuntut akuntabilitas sosial.

Cancel culture juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi “*Conquer and Divide*” yakni strategi penguasaan wilayah atau pengendalian populasi (Amalia et al., 2023), di mana pihak yang berkuasa menggunakan ketegangan tersebut untuk melemahkan perlawanan pihak lawan, kedua hal tersebut merujuk pada pendekatan di mana kelompok tertentu berusaha untuk membagi opini publik dan mengontrol narasi mengenai individu atau organisasi yang dianggap melakukan kesalahan, contoh terjadinya “*Conquer and Divide*”

ialah pada mantan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump karena selama masa kepresidenannya banyak sekali pernyataan dan kebijakan yang Trump buat menuai kritik tajam dan sering kali memicu terjadinya *Cancel culture*, misalnya setelah komentar kontroversial mengenai imigran dan minoritas, berbagai aktivis meluncurkan kampanye untuk membatalkan dukungan terhadap perusahaan yang berafiliasi dengan Trump dan hal ini membuat perpecahan antara pendukung dan penentangannya dalam memperkuat polarisasi politik di Amerika Serikat. Dengan memicu *Cancel culture*, aktor yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan fragmentasi dalam masyarakat, membuat kelompok atau individu yang tidak sependapat dengan mereka akan terpinggirkan atau tidak mempunyai ruang untuk bersuara. Hal ini membuat ruang publik menjadi kurang inklusif, karena hanya suara-suara yang selaras dengan kepentingan pihak berkuasa yang mempunyai ruang untuk berkembang.

Dalam beberapa wacana ilmiah mengenai fenomena *Cancel culture* di media sosial banyak mengambil rute yang berbeda, tujuannya untuk memeriksa kualitas dan sejauh mana kampanye media sosial menentang bentuk rasisme dan ketidakadilan sosial yang dirasakan (Bouvier & Machin, 2021). Selain itu penelitian lain menunjukkan bahwa penyebaran sistem *Cancel culture* semacam ini sebetulnya kurang memberikan dampak terhadap perubahan dalam permasalahan ini untuk menemukan solusi yang paling sederhana. Oleh karena itu, *Cancel culture* menunjukan bahwa fenomena tersebut bisa mendominasi juga menjadi pembahasan topik sosial dan politik dalam ranah sanksi sosial (Bouvier & Machin, 2021).

Di sisi lain, *Cancel culture* bisa menjadi ekspresi reaktif yang berpotensi menyerang subjek yang dianggap melakukan kesalahan. Selain ditemukan pertama kali di China pada tahun 1991, fenomena *Cancel culture* juga berevolusi dari fenomena Amerika Serikat '*Woke Culture*' dan '*Call-out Culture*', yang mencerminkan sikap yang memahami dan peduli terhadap isu-isu sosial (Effendi & Febriana, 2023). Di negara-negara Asia, khususnya Korea Selatan, *Cancel culture* telah menjadi praktik umum terhadap publik figur. Berita tentang masalah atau skandal yang melibatkan publik figur sering kali mengecewakan para penggemar dan berujung pada fenomena *Cancel culture*, yang menyebabkan aktivitas mereka terhenti. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, *Cancel culture* juga mulai menjadi hal yang umum terhadap publik figur. Pada masa kini, fenomena *Cancel culture* di Indonesia belum ada tindakan tegas yang dapat dengan cepat ditangani, dan juga belum ada kajian ilmiah yang menyeluruh mengenai konsekuensi dan potensi penyelesaiannya. Oleh karena itu, penting bagi tokoh masyarakat untuk memahami dengan baik cara bertindak dan menyampaikan pendapat mereka. Karena hal ini juga bertujuan untuk masyarakat bisa lebih bijaksana dalam merespons informasi yang diterima.

Banyak sekali kekhawatiran yang muncul dengan sistem atau tradisi ini karena kebanyakan dari SDM di Indonesia masih menganggap kesempatan diberikan bagi siapapun yang pernah terlibat skandal untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dengan memberikan penjelasan yang lebih relevan atau klarifikasi. Tetapi, di Korea Selatan hal tersebut sangat tidak bisa di

toleransi karena bagi Masyarakat mereka bila seseorang terbukti melakukan kesalahan yang dapat merugikan orang lain terlebih citra negara nya haruslah mendapatkan sanksi sosial yang adil.

Salah satu bentuk ketidaktegasan Indonesia dalam melaksanakan sistem *Cancel culture* ini ialah banyaknya tokoh politisi yang sudah melakukan banyak pelanggaran namun masih dipuja-puja dan diberikan banyak dukungan dari masyarakatnya bahkan pelaku korupsi pun masih bisa mencalonkan diri sebagai aktor politik dan tidak diberikan hukuman. Selain korupsi banyak juga kasus politisi yang menghalalkan segala cara untuk lolos dari hukum, contohnya ialah dengan secara tiba-tiba mengubah undang-undang dengan seenaknya tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada rakyat (Sudaryanto & Andrianto, 2024).

Dibandingkan dengan Indonesia, di Korea Selatan Masyarakat dan tokoh publik berlomba-lomba untuk menjaga image dan citra mereka, mereka lebih sering bersikap *private* atau tertutup karena inilah *Cancel culture* memengaruhi bagaimana cara mereka berinteraksi. Banyak dari individu yang merasa terasingkan karena minimnya interaksi dalam berbicara ataupun bersikap maupun berbagi pandangan satu sama lain. Dengan demikian, dampak dari adanya fenomena *Cancel culture* ini bukan hanya terbatas pada individu yang terlibat namun juga bisa meluas ke masyarakat secara keseluruhan. Sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari *Cancel culture* ini dan bagaimana media sosial bisa berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat tentang *Cancel culture*.

Walaupun fenomena *Cancel culture* di Indonesia terus berkembang dan dengan semakin sadarnya pentingnya akuntabilitas publik, akan tetapi masih banyak tokoh masyarakat yang tetap bertahan meski terlibat skandal. Faktor seperti masih kuatnya budaya kronisme dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menindak tegas para pelanggar norma (Altamira & Movementi, 2023).

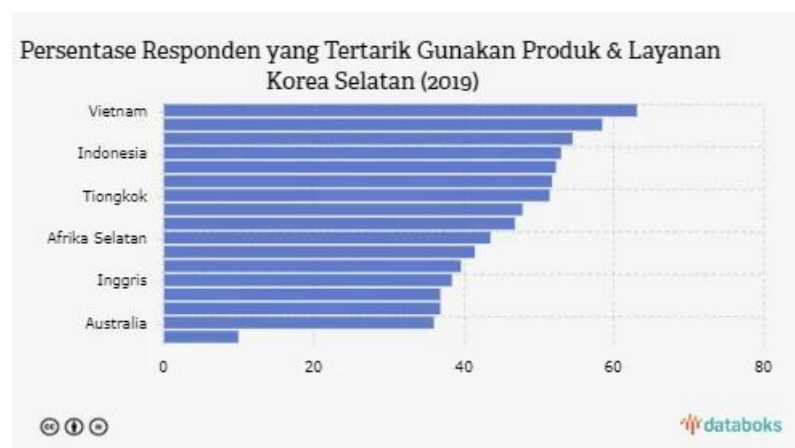
Salah satu cara untuk mempermalukan orang di media sosial adalah *Cancel culture* (Pearson, 2021). Selain itu, *Cancel culture* juga digambarkan sebagai bentuk ketidaksetaraan terhadap pendapat yang berbeda. Dalam jurnalnya (Nguyen, 2020) melakukan penelitian tambahan yang disebut "*Cancel culture on Twitter: The Effects of Information Source and Messaging on Post Shareability and Perceptions of Corporate Greenwashing*". Bagi segelintir orang yang melakukan pelanggaran norma, tindakan *Cancel culture* dapat menyebabkan konflik dan memengaruhi reputasi mereka di masyarakat.

Dalam *Cancel culture*, media sosial berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan gerakan atau isu tersebut, yang kemudian diikuti oleh tindakan nyata dari pengguna lainnya. Perilaku '*Cancel culture*' di media sosial menjadi topik menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut karena pada saat ini, internet menjadi tempat utama bagi masyarakat global untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata memiliki dampak yang signifikan pada dunia maya, bahkan memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara dunia maya dan dunia nyata. Sebagai contoh, munculnya aksi sosial seperti pengajuan petisi yang semakin banyak didiskusikan melalui

internet, boikot daring, dan fenomena '*Cancel culture*'. Selain itu, praktik *Cancel culture* juga dapat menjadi wadah untuk menyampaikan protes atau kritik terhadap sistem demokrasi, di mana masyarakat dari berbagai lapisan memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka.

Media sosial membantu penggemar Korea Selatan di luar negeri termasuk Indonesia mendapatkan informasi dan berita tentang informasi tokoh publik Korea Selatan. Penyebaran *Korean Wave* di Indonesia membuat banyak orang Indonesia menyukai budaya Korea Selatan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Disebabkan fakta bahwa media sosial tersedia secara bebas dan memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi di sana, mereka semakin berkembang dan memiliki lebih banyak pengguna. Pada akhirnya, seiring perkembangan zaman dan pesatnya penggunaan media sosial muncul berbagai fenomena yang dapat ditemukan dan terjadi di media sosial, seperti *Hate speech* dan *Cancel culture* (Laili & Suharso, 2024).

Databoks.com



Gambar 1.1 Negara yang Banyak Menggunakan Produk Korea Selatan

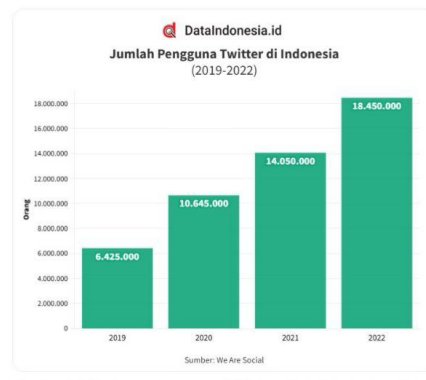
Menurut Databoks, tercatat nama Indonesia menjadi salah satu dari

beberapa negara di dunia yang paling banyak mengakses produk dan layanan dari Korea Selatan, ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang banyak menerima aktivitas *Korean Wave* sehingga banyak sekali konten dari negara ginseng tersebut yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, karena penyebarannya yang sangat cepat.

Di Korea Selatan dan Indonesia, media sosial berperan penting dalam menyebarkan dan mengembangkan *Cancel culture*. Media sosial seperti Twitter dan Instagram menjadi tempat utama netizen Korea Selatan mengutarakan pendapatnya. Ditemukan bahwa 75% pengguna media sosial Korea Selatan terlibat dalam diskusi mengenai isu kontroversial yang melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu mobilisasi sosial karena opini publik dapat menyebar dengan cepat dan memengaruhi persepsi individu (Anjarini, 2020).

Salah satu contohnya ialah, banyak dari pengguna media sosial di Indonesia menggunakan platform Twitter untuk saling berkomunikasi, memberi tanggapan, dan berinteraksi kepada sesama, platform ini sangat dikenal khususnya dikalangan anak-anak muda, karena platform ini adalah suatu platform yang terkenal akan cepatnya penyebaran Informasi baik itu dalam negeri ataupun luar negeri (Gopal et al., 2022).

DataIndonesia.id



Gambar 1.2 Jumlah Pengguna Twitter di Indonesia

Dilansir dari DataIndonesia.id pengguna twitter di Indonesia sudah semakin meningkat, ini menunjukan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 pengguna twitter di Indonesia terus mengalami kenaikan yang awalnya 6.425.000 pengguna, pada tahun 2022 melonjak hingga 18.450.000 pengguna. Faktor tersebut sangat memengaruhi Tingkat respon masyarakat sebagai pengguna media sosial dalam membuat hingga menggiring opini, salah satunya *Cancel culture*.

DataIndonesia.id



Gambar 1.3 Platform yang Banyak Dilaporkan Pemerintah

Twitter juga menjadi media sosial sarang konten negatif hingga awal maret 2023, penyebaran konten negatif media sosial ini semakin marak terjadi di Indonesiaa, konten-konten tersebut berisi mulai dari hoaks, penipuan, kebencian, pencemaran nama baik, doksing dan juga *Cancel culture*. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dikutip dalam survei PR2Media, pemerintah melaporkan hampir 1,4 juta konten negatif di platform media sosial hingga 6 Maret 2023. Pasalnya, pemerintah tidak bisa langsung menghilangkan konten negatif. Namun justru dilakukan oleh masing-masing platform media sosial.

Relasi kuasa politik juga memainkan peran penting dalam cara kerja *Cancel culture* itu bisa terjadi. Di Indonesia, fenomena ini sering dikaitkan dengan politik identitas; Persoalan agama dan suku kerap menjadi pemicu utama masyarakat mencoret politisi yang dianggap melanggar norma tersebut. Politisi menjadi sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan publik karena takut akan konsekuensi dari *Cancel culture* ini. Hal ini menciptakan suasana sulitnya dialog politik karena politisi cenderung menghindari isu-isu kontroversial demi menjaga citranya.

Sementara di Korea Selatan, *Cancel culture* sering kali digunakan sebagai alat untuk mengontrol wacana politik. Politisi mungkin merasa tertekan untuk mengikuti kuatnya opini publik di media sosia dan lebih memilih menghindari pernyataan yang dapat memicu reaksi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa *Cancel culture* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sanksi sosial, namun juga sebagai bentuk kontrol terhadap perilaku dan ucapan

politisi.

Media sosial dijadikan sebagai salah satu platform utama untuk menyebarkan informasi dan opini. Ketika seorang politisi terlibat dalam sebuah skandal, misalnya melalui pernyataan kontroversial atau pelanggaran norma-norma sosial reaksi publik sering kali terjadi dalam hitungan jam. Seperti kasus yang dialami oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah salah satu contohnya, pernyataan Ahok yang dianggap penistaan agama menuai gelombang protes dan kritik di media sosial. Tak lama kemudian tagar #ShutDownAhok menjadi trending topik dan masyarakat mengadakan demonstrasi besar-besaran yang berujung pada tuntutan hukum terhadapnya. Hal ini menunjukkan bagaimana jejaring sosial dapat mempercepat proses pembatalan dukungan terhadap tokoh politisi.

Cancel culture di Korea Selatan sering kali menciptakan polarisasi politik yang kuat. Masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang berlawanan dan kritik terhadap tokoh masyarakat dapat dengan cepat berubah menjadi serangan pribadi. Hal ini menunjukkan bagaimana *Cancel culture* dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat agenda politik tertentu atau untuk membungkam lawan politik. Oleh karena itu, media sosial berfungsi sebagai arena terjadinya konflik-konflik tersebut secara terbuka dan intens.

Kedua negara menunjukkan bahwa *Cancel culture* bukan sekadar reaksi terhadap kesalahan individu, namun juga cerminan ketegangan sosial yang lebih luas. Dalam banyak kasus, fenomena ini dapat memperkuat struktur kekuasaan yang ada, di mana kelompok tertentu menggunakan *Cancel culture*

untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelompok lain. Misalnya di Indonesia, kelompok tertentu mungkin menggunakan fenomena ini untuk menyerang lawan politiknya atau untuk mengontrol narasi publik mengenai isu-isu sensitif.

Selain itu, media massa konvensional, seperti televisi dan surat kabar, juga berkontribusi dalam narasi mengenai *Cancel culture*. Di Korea Selatan, skandal tokoh publik seringkali diliput secara luas oleh stasiun televisi, sehingga dapat menimbulkan stigma negatif bagi mereka yang terlibat. Seringkali, pemberitaan yang berlebihan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan masalah psikologis yang lebih besar bagi orang tersebut. Di Indonesia, kasus *Cancel culture* sering diberitakan di media cetak dan elektronik, namun seringkali dengan cara yang lebih sensasional, sehingga dapat memperburuk situasi.

Media juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui bagaimana pola dari *Cancel culture* itu bisa terjadi. Beberapa media di Korea Selatan telah mulai memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak psikologis dari *Cancel culture* ini dan mendorong percakapan yang lebih konstruktif. Beberapa media di Indonesia juga berupaya untuk mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan dan mendorong diskusi yang lebih terbuka.

Oleh karena itu, peran media sosial dalam *Cancel culture* sangat rumit dan mencakup banyak aspek. Tergantung pada cara orang menggunakan dan mengonsumsi jaringan sosial dan media konvensional, hal ini dapat

memperkuat atau mengurangi fenomena ini. Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji dampak media terhadap *Cancel culture* di kedua negara tersebut.

Penelitian ini ingin menemukan pola yang berbeda dalam penerapan *Cancel culture* di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai *Cancel culture* dan dampaknya terhadap karakter masyarakat dan media sosial, dengan menggunakan data yang relevan, serta menganalisis kasus-kasus yang pernah terjadi. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap *Cancel culture* dan bagaimana reaksi tersebut berbeda dengan masyarakat Korea Selatan.

Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana *Cancel culture* dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial di kedua negara. *Cancel culture* telah menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas di Korea Selatan. Masyarakat menggunakan media sosial untuk mengadakan demonstrasi dan kampanye yang menuntut perubahan, serta menggunakan *Cancel culture* sebagai alat untuk mendapatkan perhatian atas permasalahan yang sering terlupakan. Di Indonesia, potensi untuk menggunakan *Cancel culture* sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial masih terbuka, tetapi tantangan yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman akademis mengenai *Cancel culture*, namun juga memberikan informasi kepada masyarakat dan pengambil kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Cancel culture yang terjadi belakangan ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra, dan memunculkan beberapa pertanyaan. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pola terjadinya *Cancel culture*, dari penyebaran informasi, mobilisasi massa, hingga dampaknya terhadap individu atau entitas yang menjadi sasaran, di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana *Cancel culture* digunakan sebagai alat untuk menuntut akuntabilitas sosial, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh politik atau pejabat publik di Indonesia dan Korea Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan atau perluasan topik utama, sehingga penelitian dapat lebih terarah dan memudahkan proses pembahasan, dengan demikian tujuan penelitian dapat tercapai. Berikut ini adalah beberapa batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis pola penyebaran informasi tentang *Cancel culture* melalui media sosial serta dampak psikologis, sosial, dan profesional terhadap individu atau entitas yang menjadi sasaran di Indonesia dan Korea Selatan selama beberapa tahun terakhir.
2. Penelitian ini akan membatasi penggunaan *Cancel culture* sebagai alat untuk menuntut akuntabilitas sosial, khususnya dalam kasus yang

melibatkan tokoh politik atau pejabat publik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

3. Untuk mengidentifikasi pola *Cancel culture* di kedua negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, sistem hukum, dan tingkat literasi digital yang mempengaruhi dinamika fenomena ini.
4. Untuk mengidentifikasi penggunaan *Cancel culture* sebagai alat untuk menuntut akuntabilitas sosial, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh politik atau pejabat publik, serta membandingkan efektivitas dan dampaknya di Indonesia dan Korea Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari dan memahami ilmu yang berhubungan dengan judul penelitian, baik dari segi teoritis maupun sosialisasinya secara riil dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pemikiran mengenai ketegasan negara dalam pelaku penyimpangan moral yang dapat merusak citra negara tersebut.

- Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan betapa pentingnya untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik apabila menjadi seorang tokoh publik.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagaimana efek dari budaya atau system *Cancel culture* ini diterapkan di negara Indonesia dan Korea Selatan.